

ABSTRAK

Penyelenggaraan Pemilu memiliki potensi menimbulkan setidaknya empat macam permasalahan yaitu pelanggaran kode etik, pelanggaran pidana pemilu, perselisihan administrasi pemilu, dan perselisihan hasil pemilu. Dalam hal timbul sengketa administrasi pemilu maka instansi yang berwenang menyelesaikannya adalah Peradilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memiliki wewenang untuk mengadili sengketa pemilu sebagai pengadilan tingkat pertama dalam hal timbul sengketa antara KPU dengan parpol calon peserta pemilu. Penting bagi penulis untuk menganalisis kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai peradilan administratif serta prosedur penyelesaian sengketa pemilu di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta karena apabila putusannya *incrapt* akan menentukan lolos tidaknya suatu parpol atau seseorang menjadi calon peserta pemilu.

Berdasarkan latarbelakngan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan ruang lingkup kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai peradilan administrasi serta menjelaskan prosedur penyelesaian sengketa tata usaha negara pemilu di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

Penelitian ini termasuk penelitian normative deskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) agar memberikan pemahaman secara menyeluruh baik dari segi teori maupun praktek di lapangan. Bahan-bahan hukum baik primer maupun sekunder dikumpulkan dan disusun secara terstruktur serta dianalisa secara deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai peradilan administratif memiliki pasang surut seiring dengan dinamika politik dan hukum yang terjadi sebagaimana lahirnya kewenangan untuk menyelesaikan sengketa administrasi pemilu. Prosedur penyelesaian sengketa pemilu di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menggunakan hukum acara biasa akan tetapi dibuat khusus dengan meniadakan tahap dismissal proses, pemeriksaan persiapan dandengan waktu persidangan yang dipercepat untuk menyesuaikan jadwal atau tahapan pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU sehingga dibutuhkan kesiapan para pihak dalam setiap tahapan persidangan. Oleh karena itu persidangan diselenggarakan dengan seefektif mungkin dengan tanpa mengabaikan hukum acara yang berlaku.

Kata kunci : sengketa administrasi pemilu, partai politik, peradilan administrasi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

ABSTRACT

The execution of general selections has raises the potential for at least four kinds of problems, they are the ethics code violations, a criminal general selection violations, general selection of administrative disputes and disputes over the result of general selection. In the propotion of dispute arises administration general selection so the authorities instance to settle are State Administrative Courts, High State Administrative of Jakarta has the authority to judge disputes of general selections as the first court in propotion of dispute between Commisions with the political parties from the candidates of general selections. It is important for the writer to analyze the authority of State Administrative Courts as the administrative justice as well as dispute settlement procedures of general selection in High State Administrative of Jakarta because if increahrt decision will determine qualify or not a political parties or someone to be a candidate for general selection.

The basedof the problem formulation, this research has a purpose to analyze and explain the authority scope of State Administrative Courtsas well as administration of justice describes dispute resolution procedures of the state administration of general selections in the High State Administrative of Jakarta.

This research was descriptive in a normative approach to law (statute approach) and the approach of the case (case approach) so that to provide an overall understanding both in terms of theory and practice in the field. The legal materials both primary and secondary collected and compiled in a structured and analyzed deductively.

The result showed that the authority of the State Administrative as an administrative court has ups and downs along the dynamics political and law hat occurred as the appear of authority to completed administrative disputes of general selection. The completed procedures of general selection disputes in State Administrative Courts use the the usual law but made special by erasing dismissal stage process, preparing inspection and with the accelerated hearing time for adjust schedule or general selection steps which has been set by the Commision so that it takes the readiness of the parties in each phase of the trial. Because of that, the hearing was executioned withefectively without ignore the law applicale.

Keywords : disputed administration of general selection, political parties, judicial administration, the High State Administrative of Jakarta

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

(LN. 1986/77; TLN.No. 3633) Jis. Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2004 (LN.2004/35; TLN. No.4380 Jis. Undang-Undang Nomor 51 Tahun

2009 (LN.2009/160; TLN. No.5079)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (LN.

2003/98; TLN.No. 4316)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (LN. 2012/117; TLN.No. 5316)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara

Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan nomor perkara 12/G/2013/PT.TUN.JKT, perihal gugatan antara Partai Bulan Bintang terhadap Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, tanggal 7 Maret 2013.

